



LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI
KE KOTA TANGERANG
TENTANG PENINJAUAN TERHADAP ASRAMA HAJI
PROVINSI BANTEN**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023 - 2024
16 – 18 NOVEMBER 2023**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
2023**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
BAB II	JADWAL DAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK	4
BAB III	PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK	7
BAB IV	TEMUAN DAN REKOMENDASI	9
BAB V	PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin pelaksanaan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Agama RI memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) mengamanatkan bahwa tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah:

- a. memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat; dan
- b. mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, UU No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji reguler dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Agama RI. Penyelenggaraan ibadah haji khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PPIHK). Sedang penyelenggaraan ibadah umrah dilaksanakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). PPIHK dan PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah haji khusus dan ibadah umrah. Selain itu, Pemerintah, melalui Kementerian Agama RI, dalam kondisi darurat dapat menyelenggarakan ibadah umrah. Namun, hingga sekarang Pemerintah belum pernah menyelenggarakan ibadah umrah.

Layanan kepada Jemaah haji meliputi: akomodasi, konsumsi, transportasi dan dokumen. Pembinaan, misalnya pembinaan ibadah dan perjalanan. Perlindungan yaitu tentang perlindungan kepada Jemaah haji agar hak-haknya dipenuhi, baik ketika berada di Indonesia maupun ketika melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi.

Layanan akomodasi di dalam negeri dipenuhi dengan menyediakan asrama haji, seperti asrama haji embarkasi atau asrama haji transit. Oleh karena itu, pembangunan asrama haji Provinsi Banten yang tahap pertama telah selesai dibangun harus ifungsikan secara maksimal untuk memberikak layanan kepada jemaah haji yang berasal dari Provisni Banten.

BAB II
JADWAL DAN TIM
KUNJUNGAN KEJA SPESIFIK

A. Jadwal

NO.	HARI/TANGGAL	ACARA/KEGIATAN	URAIAN
KAMIS, 16 NOVEMBER 2023			
1.	Pukul 10.00 WIB	Berkumpul di Komplek Gedung DPR RI, Depan Gedung Nusantara II	
2.	Pukul 10.30 WIB	Tim Berangkat Dari Jakarta Menuju Kantor Walikota Tangerang Jl. Satria - Sudirman No.1, RT.002/RW.001, Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten Asrama Haji Provinsi Banten Jl. Kh.Hasyim Ashari, RT.001/RW.001, Cipondoh, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten	Patwal Bus
3.	Pukul 11.30 WIB	Tim tiba di Kantor Walikota Tangerang, diterima oleh Wakil Walikota, Kanwil Provinsi Banten, dan Kakan Kemenag Kota Tangerang	
4.	Pukul 11.40 WIB	Istirahat, Shalat, Makan Siang (di Kantor Walikota)	Protokol
5.	Pukul 13.00 WIB	Pertemuan dengan Wakil Walikota Tangerang, Kepala Kanwil Provinsi Banten dan Kepala Kantor Kemenag Kota Tangerang	Protokol
6.	Pukul 14.30 WIB	Rombongan menuju Asrama Haji Provinsi Banten Jl. Kh.Hasyim Ashari, RT.001/RW.001, Cipondoh, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten	Patwal Bus
7.	Pukul 15.00 WIB	Peninjauan Pembangunan Asrama Haji Provinsi Banten	
8.	Pukul 16.00 WIB	Menuju ke hotel	
9.	Pukul 19.00 WIB	Makan malam	
JUMAT, 17 NOVEMBER 2023			
1.	Pukul 07.00 – 09.00 WIB	Sarapan pagi di hotel	
2.	Pukul 10.00 WIB	Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI menuju ke Asrama Haji Provinsi	

3.	Pukul 10.30 WIB	Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI berkoordinasi dengan pengelola Asrama Haji Provinsi Banten untuk menyampaikan hasil kesepakatan antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI mengenai rencana pemanfaatan asrama sebagai tempat debarkasi untuk jemaah yang berasal dari Provinsi Banten pada tahun 1445 H/2024 M.	
4.	Pukul 13.00 WIB	Ishoma	
5.	Pukul 14.30 WIB	Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI menuju ke hotel	
6	Pukul 19.00 WIB	Makan malam	
SABTU, 18 NOVEMBER 2023			
1.	Pukul 07.00 – 09.00 WIB	Sarapan di hotel	
2.	Pukul 10.00 WIB	Kembali ke Jakarta	
3.	Pukul 11.00 WIB	Tiba di Komplek Gedung DPR RI, Depan Gedung Nusantara II	

B. Tim Kunjungan Kerja Spesifik

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANGG				
1.	107	LAKSDYA. TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, MPA.	Wkl. Ketua	GRDA	JATIM II
2.	154	I KOMANG KOHERI, S.E.	Anggota	PDIP	LAMPUNG II
3.	218	INA AMMANIA	Anggota	PDIP	JATIM VII
4.	225	MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA	Anggota	PDIP	BANTEN I
5.	272	H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., MH.	Anggota	PG	SUMBAR II
6.	323	MUHAMMAD ALI RIDHA	Anggota	PG	JATIM XI
7.	62	M. HUSNI, SE	Anggota	GRDA	SUMUT I
8.	136	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos, M.Si	Anggota	GRDA	PAPUA
9.	34	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.A.	Anggota	PKB	JATIM II
10.	529	Dr. H. ACHMAD, M.Si.	Anggota	PD	RIAU I
11.	552	WASTAM	Anggota	PD	JATENG VIII

12.	413	H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	Anggota	PKS	SUMUT II
13.	424	Dr. H. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID, M.A.	Anggota	PKS	DKI JKT II
14.	509	H. YANDRI SUSANTO, S.Pt	Anggota	PAN	BANTEN II
15.	475	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI, M.S.	Anggota	PPP	KALSEL I
16.	-	MC. ZAQKI ZACHARIAZ THAMRIN, S.S., M.Si.	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
17.	-	HERU PRIBADI	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
18.	-	MARDIYANA	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
19.	-	INAH ROFIKHOH	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
20.	-	EDI HAYAT,S.AG.,M.A	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
21.	-	Dr. AGUS SUSANTO, M.A.	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
22.	-	HIRA ASKAMAL, S.I.Kom	MEDIA DPR RI		
23.	-	MARJOKO	BAG. TRANSPORTASI		
24.	-	DADIK	BAG. TRANSPORTASI		

BAB III

PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Tangerang, Provinsi Banten dilaksanakan sesuai dengan rencana, yaitu mengadakan pertemuan dan peninjauan.

A. Pertemuan

Komisi VIII DPR RI mengadakan pertemuan dengan Wali Kota Tangerang yang diwakili oleh Wakil Wali Kota, Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Direktur Pelayanan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten. Tempatnya di Kantor Wali Kota Tangerang. Pada pertemuan tersebut, pejabat yang terkait seperti Wali Kota Tangerang, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, menyampaikan beberapa hal, antara lain, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Tangerang telah menghibahkan tanah, seluas 4,4 hektar, yang terletak di Jl. KH.Hasyim Ashari, RT.001/RW.001, Cipondoh, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, kepada Kementerian Agama, sebagai lokasi asrama haji Provinsi Banten.
2. Pembangunan asrama haji Provinsi Banten yang tahap pertama telah selesai pada awal tahun 2023 dan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M telah digunakan untuk debarkasi jemaah haji yang berasal dari Kota Tangerang.
3. Sekarang sedang pada tahap finalisasi pembangunan asrama haji Provinsi Banten tahap kedua dan pada tahun 2024 akan dilanjutkan dengan pembangunan tahap ketiga.
4. Jalan raya yang menjadi akses ke asrama haji Provinsi Banten membutuhkan pelebaran. Jalan raya tersebut merupakan jalan provinsi. Karena itu diharapkan Pemerintah Provinsi Banten berkontribusi dengan melebarkan jalan raya akses ke asrama haji Provinsi Banten tersebut.
5. Pemerintah Kota Tangerang akan mengalokasikan anggaran untuk jalan akses dari jalan raya ke asrama haji Provinsi Banten yang jaraknya kurang-lebih 100 M.
6. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten akan menjadikan asrama haji Provinsi Banten sebagai tempat debarkasi untuk jemaah haji yang berasal dari Provinsi Banten pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M, sedang embarkasinya masih tetap di asrama haji Pondok Gede, Jakarta.
7. Nama asrama haji Provinsi Banten adalah **“Grand el-Hajj Tower (Asrama Haji)”**.



B. Peninjauan

Komisi VIII DPR RI melakukan peninjauan ke asrama haji Provinsi Banten. Dalam peninjauan tersebut Komisi VIII DPR RI, melakukan:

1. Pengecekan terhadap asrama haji tahap pertama yang telah selesai dibangun. Hasilnya, asrama haji tahap pertama yang telah selesai dibangun berkualitas baik.
2. Asrama haji yang tahap kedua masih belum selesai, masih dalam tahap finalisasi.
3. Pagar dan masjid untuk asrama haji Provinsi Banten belum ada.



BAB IV TEMUAN DAN REKOMENDASI

A. Temuan

1. Jalan raya yang menuju ke asrama haji Provinsi Banten membutuhkan pelebaran. Selain itu, jalan akses dari jalan raya ke asrama haji juga belum diaspal.
2. Demikian juga, asrama haji Provinsi Banten belum memiliki masjid dan belum dipagar.
3. Asrama haji Provinsi Banten yang telah selesai dibangun pada tahap pertama siap untuk digunakan proses debarkasi jemaah haji yang berasal dari Provinsi Banten pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M, sementara untuk proses embarkasinya tetap di asrama haji Pondok Gede, Provinsi Jakarta.

B. Rekomendasi

1. Kementerian Agama hendaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten agar Pemerintah Daerah berkontribusi terhadap kebutuhan pelebaran jalan raya sebagai akses ke asrama, pengaspalan jalan dari jalan raya ke asrama, pembangunan pagar, dan masjid asrama haji Provinsi Banten.
2. Kementerian Agama harus memastikan bahwa proses debarkasi jemaah haji yang berasal dari Provinsi Banten di asrama haji Provinsi Banten di Cipondoh, sementara proses embarkasinya di asrama haji Pondok Gede, Provinsi Jakarta

BAB V PENUTUP

Demikian laporan mengenai pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Tangerang, Provinsi Banten mengenai peninjauan asrama haji Provinsi Banten. Harapannya, laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kunjungan kerja spesifik ke asrama haji Provinsi Banten, temuan, dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah.

